

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN DAMPAK PADA KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nurhayatul Kamaliyah¹, Aan Listiana²

¹ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

² Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

¹ nkamaliyah@gmail.com, ² aanlistiana@upi.edu

ABSTRACT

This article's background by Mr. Nadiem Makarim's statement that welfare must be prioritized so that teacher competence also increases. This statement is in stark contrast to the competency improvement policy contained in the 2003 National Education System Law. Therefore, this article aims to analyze teacher competency improvement policies. The method used in this study is a systematic review. This method uses a qualitative approach where the researcher summarizes several articles to present more comprehensive and balanced facts. The author took 51 articles which were then reduced to 20 articles to obtain the 10 most relevant and eligible articles. The results of the analysis found that of the 10 selected articles, 5 of them stated that teachers who were already prosperous automatically had their competence increase. While 5 other articles stated the opposite. So the authors conclude that there is no influence of government policies on the competence of PAUD teachers. This is possible if you look at the factors that influence the increase in teacher competence not only based on welfare. Even so, it does not mean that the government can put aside the welfare of teachers. It would be nice if policies to improve competence and welfare go hand in hand.

Keywords: Government Policy, Well-Being, Competency, ECE Teacher

ABSTRAK

Artikel ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Bapak Nadiem Makarim bahwa kesejahteraan harus diutamakan agar kompetensi guru turut mengalami peningkatan. Pernyataan tersebut sangat kontras dengan kebijakan peningkatan kompetensi yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan peningkatan kompetensi guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic review*. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti merangkum beberapa artikel untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang. Penulis mengambil 51 artikel yang kemudian direduksi menjadi 20 artikel hingga didapatkan 10 artikel paling relevan dan memenuhi syarat. Hasil analisis menemukan bahwa dari 10 artikel terpilih, 5 diantaranya menyatakan bahwa guru yang sudah sejahtera secara otomatis kompetensinya ikut meningkat. Sedangkan 5 artikel lainnya menyatakan hal yang sebaliknya. Sehingga penulis menyimpulkan tidak ada pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kompetensi guru PAUD. Hal ini memungkinkan apabila melihat faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi guru tidak hanya berdasarkan pada kesejahteraan saja. Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah dapat mengesampingkan kesejahteraan guru. Alangkah baiknya apabila kebijakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan berjalan beriringan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Kesejahteraan, Kompetensi, Guru PAUD

PENDAHULUAN

Guru memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah mengatur 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap guru dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pemerintah RI, 2005). Dalam UU Guru dan Dosen tersebut guru harus memiliki kompetensi pedagogik, keterampilan, sosial dan profesional. Guru yang memiliki keempat kompetensi tersebut dalam dirinya merupakan guru profesional (Sum & Taran, 2020).

Dalam rangka mendukung guru dalam meningkatkan profesionalitasnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian tunjangan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Sisdiknas 2003 (Pemerintah RI, 2003). Untuk mendapatkan tunjangan, guru diharuskan untuk melalui serangkaian proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) sehingga tersertifikasi sebagai guru profesional (Maryani, 2022). Pemerintah menyediakan dua opsi PPG, pra jabatan dan dalam jabatan (Mariati, 2021).

PPG dalam jabatan ditujukan kepada guru yang sudah memiliki pengalaman mengajar dan terdaftar dalam aplikasi dapodik (Quddus, 2019). PPG dalam jabatan ini diberikan secara gratis kepada guru (Arifudin & Abidin, 2020). Cara untuk dapat mengikuti PPG dalam jabatan, guru perlu menunggu panggilan dari pemerintah. Panggilan tersebut bisa dilihat pada akun SIMPKB masing-masing guru (Darmiatun & Nurhafizah, 2019). Setelah mendapatkan panggilan, guru perlu melakukan *pretest* untuk diuji kelayakannya dalam melaksanakan PPG (Hartati & Annisa, 2018). Setelah lulus *pretest*, barulah guru tersebut dapat mengikuti program PPG dalam jabatan.

Banyak permasalahan yang terjadi dalam sistem pelaksanaan PPG dalam jabatan ini. Rangkaian proses yang sangat banyak, sedangkan SDM yang memumpuni untuk menyertifikasi masih terbatas (Alam, Sumantri, & Khaerudin, 2022). Hal ini berdampak pada antrean guru yang akan di sertifikasi menjadi sangat panjang. Akibatnya, dari awal UU Sisdiknas 2003 disahkan hingga saat ini, baru 1,3 juta guru yang tersertifikasi sedangkan 1,6 juta guru lainnya masih belum (Makarim dalam Wulandari, 2022). Ditambah lagi uji kompetensi yang diberikan berbasis komputer sangat tidak relevan dengan guru, terutama guru TK yang lekat dengan praktek. Banyak guru yang sudah lama menunggu gilirannya dan memiliki kemampuan mengajar yang memumpuni harus tersisihkan dari proses sertifikasi (Yulindrasari & Ujianti, 2018).

Menanggapi permasalahan tersebut, Nadiem Makarim merubah skema tunjangan yang tertuang dalam RUU Sisdiknas 2022. Nadiem berpendapat bahwa skema yang ada dalam UU Sisdiknas 2003 tidak relevan. Beliau mengatakan bahwa seharusnya kesejahteraan guru lebih diutamakan, baru kompetensi guru akan meningkat dengan sendirinya.

Fenomena yang terjadi dalam beberapa penelitian menyatakan tidak ada hubungan antara kesejahteraan dengan kompetensi guru (Sandi dan Yani, 2022; Fauzan, 2021; Saadah, 2018). Mereka dapat memenuhi beban kinerja yang sama, yang berbeda hanyalah status dan tingkat kesejahteraannya saja. Alasannya, banyak guru yang belum sejahtera namun memiliki kompetensi yang tinggi. Bahkan tidak sedikit guru yang sudah bisa dikatakan sejahtera karena digaji pemerintah dan tersertifikasi menunjukkan kemunduran dalam memberikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, maka dirasa perlu untuk mengkaji kebijakan pemerintah terkait pemberian tunjangan guna meningkatkan kompetensi guru.

Dalam artikel ini akan dijelaskan keterkaitan antara kesejahteraan guru dengan peningkatan kompetensi guru. Analisis dilakukan dengan beracuan pada faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yang dikemukakan oleh Chun dan Megginson (1981). Faktor tersebut diperkuat oleh pendapat Maslow (1954) tentang teori kebutuhan dasar.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif metode *systematic review*. Metode ini merupakan penelitian sistematis dimana peneliti merangkum beberapa artikel untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang (Siswanto, 2010). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari database elektronik *Google Scholar*. Adapun kata kunci yang digunakan yakni “kompetensi guru”, “guru PAUD sertifikasi”, dan “mutu guru”. Batasan artikel yang diambil yaitu tidak lebih dari 10 tahun sejak artikel ini dibuat dan topik yang dibahas relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Artikel yang ditemukan dan memenuhi kriteria akan diidentifikasi. Setelah itu, artikel yang masuk kedalam seleksi akan direview hingga mendapatkan artikel yang paling sesuai kebutuhan. Artikel yang lolos dalam proses review akan disajikan untuk dianalisis dan dibahas pada artikel ini. Adapun analisis data yang digunakan adalah *thematic analysis*, yaitu mengidentifikasi pola melalui data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendapatkan 51 jurnal kemudian direview sehingga teridentifikasi hanya 20 jurnal relevan. Dari 20 jurnal tersebut diseleksi lagi hingga didapatkan 10 jurnal yang dianggap paling sesuai dengan penelitian ini. 10 jurnal tersebut tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil *Review* Sistematis

No.	Referensi	Rangkuman
1.	Natalia, Rini, & Sofia (2016)	Tujuan: mendeskripsikan tingkat pemahaman guru PAUD yang sudah tersertifikasi tentang kompetensi pedagogik. Metode: kuantitatif-deskriptif Hasil: tingkat pemahaman kompetensi pedagogik guru PAUD yang tersertifikasi 80% masuk dalam kategori baik dan 20% masuk dalam kategori cukup.
2.	Qomario, Kurniasih, & Anggraini (2018)	Tujuan: menganalisis capaian nilai UKG guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bandar Lampung tahun 2015, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan usia guru PAUD yang sudah mengikuti UKG di Kota Bandar Lampung tahun 2015. Metode: metode kualitatif korelasi Hasil: tidak terdapat korelasi secara signifikan dan erat antara nilai UKG dengan sertifikasi guru PAUD di Kota Bandar Lampung, artinya tidak terdapat kecenderungan hubungan antara sertifikasi guru dengan nilai UKG. Terdapat korelasi yang signifikan walaupun keeratannya rendah antara nilai UKG dan usia guru PAUD di Kota Bandar Lampung, artinya kecenderungan hubungan antara nilai UKG dan belum mampu menggambarkan latar belakang, sertifikasi guru PAUD. Tidak terdapat hubungan signifikan latar belakang pendidikan, sertifikasi dan usia guru PAUD terhadap nilai UKG di Kota Bandar Lampung.

3.	Wiranti (2015)	<p>Tujuan: pandangan guru TK tentang pengembangan profesionalitas pasca sertifikasi; upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru TK dalam mengembangkan profesionalitas; hambatan guru TK tentang pengembangan profesionalitas pasca sertifikasi; serta upaya-upaya yang dilakukan guru TK untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pengembangan profesionalitas guru</p> <p>Metode: kualitatif-deskriptif</p> <p>Hasil: pandangan guru mengenai pengembangan profesionalitas guru TK pasca sertifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki guru seiring berkembangnya zaman; upaya yang dilakukan guru TK untuk pengembangan profesionalitas yaitu seminar, workshop, kegiatan kolektif guru seperti KKG, Gugus, IGTKI, PGRI; hambatan yang ditemui dalam pengembangan profesionalitas yaitu dari diri sendiri kurangnya waktu dan kurang kemampuan, dari lembaga berupa kurangnya sarana dan prasarana pendukung; dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu mendisiplinkan waktu, membentuk <i>team teaching</i>, mengadakan koordinasi dengan komite.</p>
4.	Nusa & Irawan (2020)	<p>Tujuan: meninjau perbedaan kinerja guru PAUD yang sudah tersertifikasi dan belum sertifikasi; perbedaan kinerja guru PAUD dengan pendidikan terakhir PAUD/Psikologi dan non PAUD/ non Psikologi; interaksi antara sertifikasi dan pendidikan terakhir terhadap kinerja guru PAUD.</p> <p>Metode: kuantitatif-kausal komparatif</p> <p>Hasil: kinerja guru yang telah tersertifikasi lebih baik dibandingkan yang belum sertifikasi; kinerja guru PAUD dengan pendidikan terakhir PAUD/Psikologi dan non PAUD/Psikologi sama baiknya; Tidak terdapat interaksi antara sertifikasi dan latar belakang pendidikan terhadap kinerja guru PAUD.</p>
5.	Rohmadheny (2022)	<p>Tujuan: memperoleh informasi terkait perbedaan kinerja guru bersertifikasi dan guru belum bersertifikasi.</p> <p>Metode: kuantitatif komparatif.</p> <p>Hasil: tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja guru bersertifikasi dan guru belum bersertifikasi.</p>
6.	Zyuro (2020)	<p>Tujuan: mengetahui permasalahan kompetensi pedagogik guru tersertifikasi di PAUD di Kecamatan Lamongan.</p> <p>Metode: kualitatif deskriptif</p> <p>Hasil: terdapat permasalahan dalam kompetensi pedagogik guru tersertifikasi dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor internal dan eksternal yaitu dari guru yang mempunyai latar belakang sarjana non pendidikan, umur, dan dari tim penyusun perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunannya.</p>
7.	Wijaya, Nasution, Qadri, Anwar, & Fuadi (2022)	<p>Tujuan: menganalisa persepsi guru tentang kebijakan sertifikasi guru dalam peningkatan mutu pendidikan dan bagaimana persepsi guru RA Ali Mahfudz tentang kebijakan sertifikasi guru dalam peningkatan mutu pendidikan.</p> <p>Metode: kualitatif – studi kasus</p> <p>Hasil: kebijakan sertifikasi guru memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, hal ini didasarkan pada tujuan utama kebijakan ini sebagai upaya men-sejahterakan guru, melatih keterampilan guru, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru. Begitupun, terdapat beberapa permasalahan di lapangan, yaitu orientasi guru terhadap kesejahteraan hidup semata dan mengajar sebatas kewajiban.</p>

8.	Alfath & Huliatusnisa (2020)	Tujuan: mengetahui bagaimana kinerja guru yang bersertifikasi pendidik layak dalam melaksanakan tugas pendidik profesional, meningkatnya proses pembelajaran, meningkatnya kesejahteraan dan martabat guru di Sekolah Dasar Negeri Dukuh V Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Metode: kualitatif deskriptif. Hasil: kebijakan sertifikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja guru yang berdampak pada terwujudnya pendidikan nasional yang bermutu.
9.	Siswandari & Susilaningsih (2013)	Tujuan: mengkaji dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Metode: pendekatan mixed method. Hasil: hanya 37% dari guru bersertifikasi yang dapat menyampaikan materi dengan jelas, kemampuan pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan mengikuti perkembangan iptek dan inovasi pembelajaran serta pengembangan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan; diskusi antar sejawat yang mengampu mata pelajaran sama merupakan upaya yang paling diminati untuk mempertahankan profesionalitasnya; guru bersertifikasi belum menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas secara signifikan.
10.	Ilvagustina, Nasirun, & Delrefi (2016)	Tujuan: mendeskripsikan kinerja guru PAUD yang sudah sertifikasi di Kecamatan Lebong Utara dibidang perencanaan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Metode: deskriptif-kuantitatif. Hasil: perencanaan semester, perencanaan pembelajaran pada tahap awal, konfirmasi dan penutup serta penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sudah sertifikasi sudah baik sesuai standar yang ada.

Berdasarkan telaah review artikel diatas, 5 dari 10 artikel setuju bahwa kebijakan sertifikasi dalam meningkatkan kesejahteraan guru berdampak positif pada kompetensi guru. Sedangkan artikel lainnya memiliki pendapat bertentangan. Saat hasil penelitian berada di tengah, tidak berpihak kepada salah satu sisi maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh sama sekali. Disini penulis menarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh kebijakan sertifikasi dalam meningkatkan kesejahteraan guru terhadap kompetensi guru. Peneliti melihat bahwa guru mengembangkan kompetensinya tidak hanya didasari oleh terpenuhi kesejahteraannya. Ada berbagai macam faktor lainnya seperti yang dijabarkan oleh Chung dan Megginson (1981) yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya kebutuhan, tujuan, sikap dan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal yaitu gaji, keamanan, sesama pekerja, pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu sendiri.

Selaras dengan pendapat Chung dan Megginson terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Maslow (1954) membahasnya lebih lanjut dalam bukunya *Motivation and Personality*, membagi dalam beberapa tingkatan. Pengelompokan setiap tingkatan tersebut didasarkan pada kebutuhan manusia. Maslow (1954) menegaskan apabila terpenuhi satu tingkatan, maka kebutuhan guru akan naik pada tingkatan selanjutnya. Kebutuhan tersebut sebagai berikut: 1) Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan paling utama dan mendasar dalam kehidupan setiap orang. Saat kebutuhan ini terpenuhi, maka yang lainnyapun akan tercapai dengan baik. Kebutuhan ini meliputi segala aspek mendasar yang dapat menopang hidup manusia.

Dalam dunia kerja, tidak jarang ditemui orang berada pada posisinya sekarang dengan tujuan mencapai kebutuhan untuk bertahan hidup.

Fenomena yang terjadi pada guru PAUD yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi adalah mereka sibuk mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan. Mereka mengutamakan pekerjaan lainnya karena lebih bisa menopang kehidupan dibandingkan dengan mengajar. Dampaknya, mutu pendidikan yang diberikan masih sangat rendah. Dalam jangka panjang, tentu hal ini dapat berakibat fatal. Mengingat PAUD merupakan pondasi awal sebelum anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Apalagi anak usia dini berada pada masa *golden age*. Apabila pendidikan tidak diberikan secara optimal akan berdampak pada tahapan berikutnya. Meskipun begitu, tidak sedikit pula dijumpai guru belum tersertifikasi yang memiliki kompetensi yang memadai. Alasannya hanya 2, dia berasal dari keluarga kelas ekonomi keatas atau menjadikannya sarana untuk belajar guna mencapai posisi yang lebih baik lagi.

Fenomena bertolak belakang terjadi pada guru yang sudah mendapatkan tunjangan. Mereka menjadi lebih mapan secara ekonomi, sehingga dapat lebih fokus untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Meskipun tidak jarang ditemui guru yang sudah lanjut usia menggadaikan SKnya guna menutupi hutang yang selama ini ia gunakan selama hidup saat belum tersertifikasi. Sehingga jangankan untuk mengaktualisasikan dirinya, ia akan lebih fokus untuk membayar hutangnya. Oleh sebab itu, perbedaan usia saat kebutuhan fisiologi terpenuhi menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap kompetensi yang dimiliki guru. Semakin muda usia guru memenuhi kebutuhan fisiologinya, semakin baik pula kompetensi yang dimilikinya.

Selanjutnya 2) Rasa aman, saat seorang guru berhasil memenuhi kebutuhan fisiologinya, maka selanjutnya dia akan merasa butuh akan rasa aman. Dia akan mengurangi resiko yang akan membahayakan keselamatan dan kesehatannya. Jika saat kebutuhan fisiologinya belum terpenuhi dia akan bekerja keras memenuhi kebutuhan hingga mengabaikan kesehatan dan keselamatannya, maka setelahnya dia akan lebih peduli. Dia akan mengurangi beban kerja yang sekiranya berlebihan.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa guru yang belum sertifikasi, akan memiliki banyak pekerjaan sampingan. Sebuah contoh seorang guru yang memiliki sampingan berdagang pakaian. Sebelum mendapatkan tunjangan, dia bekerja keras menjual pakaiannya. Bahkan dia rela mengantarkan pakaian hingga ke pelanggan demi keuntungan yang tidak seberapa. Namun, saat sudah mendapatkan tunjangan, tujuannya berjualan bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga dia akan memikirkan cara lebih efisien untuk tetap berjualan namun tidak menyita waktu bahkan tenaga dan kesehatannya.

Pada nomor 3) Kasih sayang, setelah guru merasa aman saat bekerja, dia akan bisa lebih mencintai segala sesuatu terkait pekerjaannya. Dari situlah guru akan merasa kepemilikan akan pekerjaan dan lembaga yang menaunginya. Sehingga dia akan berusaha untuk mempertahankan bahkan mungkin memberikan inovasi yang dapat membuat lembaganya lebih unggul. Hal yang kontras terjadi pada guru yang belum terpenuhi kebutuhan fisiologinya. Jangankan untuk mencintai pekerjaan, dia tidak akan tahan menghabiskan waktu di lembaga. Saat kewajiban mengajarnya sudah ditunaikan, dia akan segera pamit untuk pulang. Tidak jarang, guru tersebut juga akan ijin tidak masuk. 4) Penghargaan, guru yang sudah nyaman dengan pekerjaannya, mempunyai rasa kepemilikan terhadap lembaganya akan terus berinovasi guna memajukan lembaga.

Salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan guru adalah dengan mengikuti seminar, *workshop* dsb. Dengan begitu, guru kompetensi guru akan meningkat dibuktikan dengan adanya sertifikat. Namun, berbeda dengan guru yang belum nyaman dengan pekerjaannya. Jangankan memiliki kesadaran untuk meningkatkan kompetensi, mengikuti seminar saja menunggu adanya perintah. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi pada guru yang belum mendapatkan tunjangan saja, namun juga yang sudah. 5) Aktualisasi diri, puncak tertinggi kedewasaan diri seorang guru adalah saat dia dapat mengenali potensi dirinya dan memaksimalkannya. Kemampuan ini hanya bisa didapatkan melalui pencarian panjang dalam memahami benih-benih bakat terpendam yang ada dalam dirinya. pencarian tersebut dapat melalui mengikuti *workshop*, seminar dsb. Setelah mengetahui potensinya, guru akan terus mengasahnya serta mengembangkannya. Tujuannya adalah agar potensi yang dimilikinya tersebut matang. Dengan demikian dia dapat menyalurkannya kepada peserta didik.

Terlepas dari itu semua, seorang guru akan senantiasa meningkatkan kompetensi dirinya apabila dia memiliki kesadaran akan kewajibannya, urgensinya, serta dampaknya. Oleh karena itu penting bagi *stakeholder* untuk memupuk kesadaran dalam pribadi setiap guru. Dalam prosesnya, pemerintah juga akan lebih baik apabila mengiringi dengan memberikan apresiasi berupa peningkatan kesejahteraan guru. Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi lebih pada guru yang mau terus belajar dan meningkatkan kompetensinya guna menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas keterkaitan antara kebijakan peningkatan kesejahteraan dengan kompetensi guru PAUD dalam rangka perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Setelah melakukan analisis, ditemukan 5 dari 10 artikel berada pada sisi kontra sedangkan 5 lainnya pada sisi pro. Peneliti menarik kesimpulan berupa tidak ditemukannya pengaruh kebijakan peningkatan kesejahteraan terhadap kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, tidak hanya kesejahteraan saja. Meskipun berdasarkan pendapat Maslow (1954) faktor kebutuhan fisiologi seperti gaji dan tunjangan merupakan hal mendasar dalam kebutuhan manusia. Sehingga bila mana guru terpenuhi kebutuhan dasarnya maka kebutuhannya akan naik pada tingkat selanjutnya yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kompetensinya. Meskipun demikian, peneliti meninjau faktor yang paling utama adalah kesadaran akan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi itu sendiri. Untuk peneliti selanjutnya, mungkin bisa menggali lebih dalam terkait kesadaran guru untuk meningkatkan kompetensinya. Penelitian dapat diberikan untuk semua guru baik yang sudah mendapat tunjangan ataupun belum. Kemudian hasilnya dapat dibandingkan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2016). Dampak sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan pada madrasah aliyah di Kota Kendari. *Al-Qalam*, 21(1), 117-128. <http://dx.doi.org/10.31969/alq.v21i1.204>
- Alam, S., Sumantri, M. S., & Khaerudin, K. (2022). Implementasi Program Pendidikan Profesi Gurur Dalam Jabatan Bidang Studi Guru Kelas SD di Era Covid-19.

- Journal of Elementary School (JOES)*, 5(1), 79-87. <https://doi.org/10.31539/joes.v5i1.3916>
- Alfath, M. D., & Huliatusunisa, Y. (2020). Analisis kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru. *Indonesian Journal of Elementary Education*, 2(1), 78-91. <http://dx.doi.org/10.31000/ijoe.v2i1.3900>
- Arifudin, R., & Abidin, Z. (2020). Teachers' perceptions of their use of SPADA Bright-space: A professional education for in-service teacher context. *6th International Conference on Mathematics, Science, and Education (ICMSE 2019)*. 1567, p. 032027. Boston: IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1567/3/032027
- Chung, K. H., & Megginson, L. C. (1981). *Organizational Behavior: Developing Managerial Skills*. English: HarperCollins Publishers.
- Darmiatun, S., & Nurhafizah, N. (2019). Peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru TK melalui program diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(1), 704-714. <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i2.271>
- Fauzan, G. A. (2021). Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan. *Journal on Education*, 4(1), 197-208. <https://doi.org/10.31004/joe.v4i1.418>
- Hartati, T., & Annisa, N. (2018). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Primaria Educationem Journal (PEJ)*, 1(2), 149-155.
- Ilvagustina, I., Nasirun, H. M., & Delrefi, D. (2016). Kinerja guru PAUD yang sudah tersertifikasi di Kecamatan Lebong Utara. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 51-56. <https://doi.org/10.33369/jip.1.1.51-56>
- Mariati, M. (2021). Analisis Faktor Penghambat dan Penunjang Pelaksanaan Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) pada Mahasiswa PPG dalam Jabatan Mapel Akuntansi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 348-359). Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Maryani, E. (2022). Pendidikan profesi guru (PPG) sebagai cara untuk menjadikan guru menjadi profesional. *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2(4), 171-178.
- Maslow, A. (1954). *Motivation and Personality*. English: Harper & Row.
- Natalia, E. D., Rini, R., & Sofia, A. (2016). Persepsi Guru PAUD Terhadap Kompetensi Pedagogik. *Jurnal Pendidikan Anak*, 2(2), 1-9.
- Nusa, P. R., & Irawan, E. (2020). Dampak sertifikasi dan pendidikan terakhir terhadap kinerja guru PAUD di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 27-40. <https://doi.org/10.21154/wisdom.v1i1.2134>
- Pemerintah RI. (2003). *Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Pemerintah RI. (2005). *Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Qomario, Kurniasih, S., & Anggraini, H. (2018). Studi analisis latar belakang pendidikan, sertifikasi guru dan usia guru PAUD di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil nilai uji kompetensi guru (UKG). *Jurnal Cakrasana-Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 81-101. <https://doi.org/10.31326/jcpaud.v1i02.180>

- Quddus, A. (2019). Implementasi technological pedagogical content knowledge (TPACK) dalam pendidikan profesi guru (PPG) PAI LPTK UIN Mataram. *Jurnal Tatsqif*, 17(2), 213-230. <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i2.1911>
- Rohmadheny, P. S. (2022). Analisis Kinerja Guru TK Berdasarkan Sertifikasi Profesi. *Murangkalih: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 1-13.
- Saadah, N. (2018). Studi komparatif tentang perbedaan kinerja guru PKN PNS dengan non PNS (Studi pada SMP di Kota Singaraja). *JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNDIKSHA*, 6(2), 1-10. <https://doi.org/10.23887/jpku.v6i2.22063>
- Sandi, A., & Yani, A. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Guru PNS Dengan Guru Honorer Pada SMAN 2 Woha Kabupaten Bima. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 11-14. <https://doi.org/10.55784/jueb.v1i1.57>
- Siswandari, S., & Susilaningsih, S. (2013). Dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 487-489.
- Siswanto. (2010). Systematic review sebagai metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian (sebuah pengantar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 326-333. 10.22435/bpsk.v13i4 Okt.2766
- Suarman, & Syahza, A. (2013). Dampak kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru di daerah Riau. *Jurnal Pendidikan*, 4(2), 72-83. <http://dx.doi.org/10.31258/jp.4.2.72-83>
- Sum, T. A., & Taran, E. G. (2020). Kompetensi pedagogik guru PAUD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. *Jurnal Obsesi*, 4(2), 543-550. 10.31004/obsesi.v4i2.287
- Wijaya, C., Nasution, T., Qadri, M. A., Anwar, K., & Fuadi, A. (2022). Persepsi Guru RA tentang Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Obsesi*, 6(2), 738-751. 10.31004/obsesi.v6i2.1551
- Wiranti, N. (2015). Pengembangan profesionalitas guru taman kanak-kanak bersertifikasi di Kecamatan Nanggulan Kulon Progo. *Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(6), 1-10.
- Wulandari, T. (2022, September 1). *RUU Sisdiknas: 1,6 Juta Guru Tak Perlu Sertifikasi, Langsung Dapat Tunjangan*. Retrieved from detikedu: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6265769/ruu-sisdiknas-16-juta-guru-tak-perlu-sertifikasi-langsung-dapat-tunjangan>
- Yulindrasari, H., & Ujianti, P. R. (2018). “Trapped in the reform”: Kindergarten teachers’ experiences of teacher professionalisation in Buleleng, Indonesia. *Policy Futures in Education*, 16(1), 66-79. <https://doi.org/10.1177/1478210317736206>
- Zyuro, H. S. (2020). Analisis masalah kompetensi pedagogik guru PAUD tersertifikasi di Kecamatan Lamongan. *Jurnal PAUD Teratai*, 9(1), 1-7.